

STUDI PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Oleh:

Yustianingsih, Nina Widowati, Maesaroh

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a developing country with one of the problems is large population growth. To reduce the rate of population growth, the government launched a Family Planning Program. Family Planning Program is a movement to establish a healthy and prosperous families by limiting births. For the success of family planning programs need a community participation, especially the participation of male. This research was conducted in the District of Tugu, Semarang City, using qualitative-descriptive methods. This study aims to description male participation in family planning programs in District of Tugu and identify the factors that inhibit the participation of male in family planning programs in District of Tugu. Collecting data in this study using interviews with informants and by observation. To describe the participation of male in family planning programs, using the theory of the participation of Keith Davis, there is also a theory of communication and education are used to determine what might be inhibiting male participation. From the research, it was found that male participation in family planning programs in District of Tugu is still relatively low. There are factors that hinder the participation of male in family planning programs in District of Tugu that is a factor of communication and education.

keywords: male participation, communication, and education

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan salah satu permasalahannya yaitu masih tingginya pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk

Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Apabila hal ini terus menerus terjadi, akan berdampak buruk terhadap pembangunan nasional. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,29% dari tahun 2005 dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa, maka pada tahun 2009 mencapai 231 juta

jiwa. Hasil sensus tahun 2010 yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% pertahun (*Wikipedia*, 2010). Tingginya pertumbuhan penduduk diakibatkan salah satunya oleh angka pertumbuhan alamiah dimana tingkat fertilitas yang masih relatif tinggi. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-3 memiliki jumlah penduduk terbanyak, yakni 29,653,266 jiwa pada tahun 1995, naik menjadi 31,228,940 jiwa pada sensus tahun 2000, dan data sensus terakhir yang diadakan pada tahun 2010 mencapai 32,382,657 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik). Sementara itu, Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang besar pula, pada tahun 2011 berjumlah 1.585.417 jiwa.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan Program Keluarga Berencana. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pelaksanaan program Keluarga Berencana menggunakan alat-alat kontrasepsi yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti *Intra Uterine Device* (IUD), Medis Operatif Pria (MOP), Medis Operatif Wanita (MOW), Susuk, Suntik, Pil dan Kondom. Partisipasi masyarakat dalam ber-KB dapat dilihat dari jumlah peserta masing-masing alat kontrasepsi, dari jumlah peserta inilah akan diketahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam peran sertanya mengikuti program keluarga berencana di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Data BKKBN hingga September 2012 menyebutkan, di Indonesia ada 34,3 juta peserta aktif KB perempuan dan 1,4 juta peserta aktif KB pria (www.kompas.com). Dapat dikatakan bahwa keikutsertaan pria dalam program Keluarga Berencana di Indonesia masih rendah. Jumlah peserta

aktif KB pria di Kota Semarang pada tahun 2012 adalah 16.295 orang (0,9%) dari 261.320 PUS. Total peserta aktif KB pria tersebut merupakan jumlah peserta KB pria yang menggunakan MKJP dan Non MKJP masing-masing sejumlah 2.380 dan 13.915 . Berdasarkan Laporan Umpan Balik Program Nasional Keluarga Berencana Kota Semarang pada Desember tahun 2012 (Sumber: Bapermasper & KB Kota Semarang Bidang Keluarga Berencana), dari 16 kecamatan di Kota Semarang, kecamatan yang memiliki jumlah peserta paling rendah adalah Kecamatan Tugu. Persentase peserta aktif KB pria di kecamatan Tugu adalah sejumlah 2,4 % (131 orang) dari Total PUS sebanyak 5.466 orang, dapat dirinci dengan penggunaan MKJP (MOP) sebanyak 39 orang dan Non MKJP (KDM) sebanyak 92 orang. Sementara itu partisipasi tertinggi berada di Kecamatan Gajah Mungkur sebesar 9 % dengan jumlah peserta 770 dari Total PUS sebanyak 8.559 jiwa.

Pembangunan pada dasarnya terdiri dari dua aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Salah satu indikator dari aspek sosial dapat dilihat dari pendidikan, pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia dalam suatu wilayah tertentu (Sa'diyah, 2012:6).

Pendidikan adalah keseluruhan cara-cara bertingkah laku manusia dalam kehidupan dan penghidupannya (dalam Noor Syam, 2003:79). Pendidikan dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai tingkah laku dan tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang diharapkan dari sebuah program atau kegiatan. Seseorang yang memiliki

pendidikan yang memadai akan memiliki wawasan yang luas terhadap berbagai macam hal-hal yang ada dalam kehidupannya.

Berdasarkan data dari Kecamatan Tugu Dalam Angka 2010 dan Semarang Dalam Angka 2011, masyarakat di Kecamatan Tugu dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi memiliki persentase yang paling rendah yakni sebesar 8 % atau sebanyak 2408 jiwa, sebagian besar pendidikan terakhir masyarakat adalah sekolah dasar sebanyak 21 % (6262 jiwa). Disamping pendidikan masyarakat yang masih rendah, dari segi sosialisasi program KB melalui slogan KB yang berbunyi “Dua Anak Lebih Baik” yang banyak ditemukan pada baliho di jalanan ataupun disiarkan di televisi dianggap tidak tegas sehingga program KB jadi terkesan longgar dan tidak mendapatkan cukup respon dari masyarakat (www.republika.co.id), dari slogan tersebut hanya menekankan pada hasil program, sebaiknya berfokus juga pada proses program itu sendiri yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program KB khususnya pria. Sosialisasi KB yang ada di media cetak, media elektronik, maupun media online belum ada yang bertujuan untuk mengajak pria ber-KB. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan sedikitnya informasi yang dimiliki masyarakat bahwa program KB juga merupakan tanggung jawab pria.

Menurut pendapat penulis rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB pria di Kecamatan Tugu disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai program KB dan manfaatnya dan belum optimalnya sosialisasi dan komunikasi program KB yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan melatarbelakangi deskripsi di atas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Tugu Kota Semarang”

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Studi Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kota Semarang adalah:

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang.

C. TEORI

C.1. PARTISIPASI

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (dalam Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi sebagai “*keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama*,”. Alastaire White (dalam Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi sebagai, “*keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan*”. Di dalam pengertian ini partisipasi merupakan keterlibatan individu maupun komunitas secara spontan dan aktif dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama.

Istilah partisipasi sering dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Istilah partisipasi tersebut akan nampak lebih jelas maknanya apabila secara

langsung dikaitkan dengan pembangunan. Tjokroamidjojo (dalam Ainur Rohman, 2009:46) mengartikan partisipasi sendiri sebagai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen partisipasi.

Di dalam kaitannya dengan pembangunan, mengutip pendapat Koentjaraningrat (dalam Ainur Rohman, 2009:46) terdapat dua pengertian mengenai partisipasi, yakni: *pertama*, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus; dan *kedua*, partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan.

Partisipasi tidak hanya keikutsertaan secara mental saja namun juga keterlibatan emosi, demikian yang disampaikan oleh Charly (dalam Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya.

Keith davis (dalam Khairuddin, 2000:120) memberikan pengertian partisipasi: "*as mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*". Di dalam pengertian ini paling tidak dapat dijumpai adanya 3 hal pokok, yaitu:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok,
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi tergerak terhadap kepentingan atau tujuan kelompok yang dapat berujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga dan keterampilan,

3. Partisipasi merupakan tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Fokus partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi bergerak. Wujud kontribusi dalam pembangunan bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang maupun buah pikiran lainnya. Ndraha (dalam Ainur Rohman, 2009-46) menyatakan dengan berpartisipasi berarti terdapat keberanian untuk menerima tanggungjawab atas suatu usaha, atau untuk mengambil bagian dalam suatu usaha.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, dan bukan sekadar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Unsur motivasi individu dalam memberikan kontribusi tergerak itu merupakan wujud nyata dari keterlibatan individu dalam kegiatan pembangunan. Di dalam hubungan ini, Mubyarto memberikan catatan tentang kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Hicks merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas (dalam Tangkilisan, 2007: 322).

Tjokroamidjojo (dalam Averroes, 2006:148) mengatakan ada tiga elemen yang

menjadi perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu:

1. Kepemimpinan, peranan kepemimpinan suatu bangsa adalah sangat menentukan. Di dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.
2. Komunikasi. Gagasan-gagasan kebijakan dan rencana hanya akan mendapat dukungan, bila diketahui dan dimengerti. Hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat.
3. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran tinggi bagi warga negara, dan memudahkan pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung pada tersedianya kualitas pendidikan, baik formal maupun informal.

C.2. KOMUNIKASI

Hovland, Janis, dan Kelley yang dikemukakan oleh Forsdale, mengatakan bahwa, "*communication is the process by which an individual transmits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals*". Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai sebuah proses, bukan sebagai suatu hal (dalam Arni Muhammad, 2007:2).

Menurut Edward komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi/ publik, ketersediaan sumber daya, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan

bagaimana struktur organisasinya (dalam Nugroho, 2009:512).

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu (dalam Agustino, 2008):

- a. Transmisi dari aparaturnya pelaksana kepada penerima program (masyarakat)
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

C.3. PENDIDIKAN

Secara historis, pendidikan dalam arti luas telah mulai dilaksanakan sejak manusia di muka bumi. Adanya pendidikan adalah setua dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Adanya perkembangan peradaban manusia, berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembangan penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan (dalam Dwi Siswoyo, 2008: 15).

Pendidikan secara populer disamakan dengan persekolahan (*schooling*) yang lazim dikenal dengan pendidikan formal, yang bergerak dan tingkat pertama Sekolah Dasar hingga mencapai tingkat terakhir dan Perguruan Tinggi. Pendapat lebih luas, menurut Philip H. Coombs (dalam Dwi Siswoyo, 2008: 16), yaitu bahwa pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar, tanpa memperhatikan dimana, atau pada usia berapa belajar terjadi. Pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (*life long process*), dari seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya.

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan

perubahan tingkah laku yang diharapkan. Hasil pendidikan yang berupa tingkah laku meliputi bentuk kemampuan yang menurut Taksonomi Bloom dkk diklasifikasi dalam 3 domain (dalam Noor Syam, 2003:120):

1. Kognitif (*cognitive domain*)
2. Afektif (*affective domain*)
3. Psikomotorik (*psychomotor domain*)
 - 1) Kemampuan kognitif
 - a. Mengetahui: kemampuan mengingat apa yang sudah dipelajari.
 - b. Memahami: kemampuan menanggapi makna dari yang dipelajari.
 - c. Menerapkan: kemampuan untuk menggunakan hal yang sudah dipelajari itu ke dalam situasi baru yang konkrit.
 - d. Menganalisis: kemampuan untuk memerinci hal yang dipelajari ke dalam unsur-unsur agar supaya struktur organisasinya dapat dimengerti.
 - e. Mensintesis: kemampuan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk membentuk suatu kesatuan yang baru.
 - f. Mengevaluasi: kemampuan untuk menentukan nilai sesuatu yang dipelajari untuk tujuan tertentu.
 - Kemampuan di atas bersifat hirarkhis, artinya kemampuan yang pertama harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai kemampuan yang kedua. Kemampuan yang kedua harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menguasai yang ketiga. Demikian seterusnya.
 - 2) Kemampuan afektif
 - a. Menerima (*receiving*): kesediaan untuk memperhatikan.
 - b. Menanggapi (*responding*): aktif berpartisipasi
 - c. Menghargai (*valuing*): penghargaan kepada benda, gejala, perbuatan tertentu.
 - d. Membentuk (*organization*): memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan pertentangan dan membentuk system nilai yang bersifat konsisten dan internal.
 - e. Berpribadi (*characterization by a value of value complex*): mempunyai sistem nilai

yang mengendalikan perbuatan untuk menumbuhkan “*life style*” yang mantap.

3) Kemampuan psikomotorik

Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan kegiatan fisik. Jadi tekanan kemampuan yang menyangkut koordinasi syaraf otot, menyangkut penguasaan tubuh dan gerak.

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan hasil wawancara dan pengamatan penulis mengenai Analisis Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang dapat digambarkan melalui hasil analisis sebagai berikut:

a. Keterlibatan Mental dan Emosi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Terdapat Paguyuban Priyo Utomo yang merupakan pertemuan atau perkumpulan warga tingkat RT, pada pertemuan ini warga diberikan edukasi mengenai program KB pria, namun paguyuban tersebut baru dilaksanakan di Kelurahan Mangunharjo saja, dan belum

rutin diselenggarakan. Kehadiran warga saat pertemuan ini sudah lumayan baik yaitu sekitar 60%, hanya saja belum semua kelurahan di Kecamatan Tugu memiliki Paguyuban Priyo Utomo, maka belum dapat menghasilkan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Secara fisik masyarakat telah hadir dalam forum, namun untuk keterlibatan mental dan emosional partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlihat.

b. Kontribusi Terhadap Kepentingan atau Tujuan Kelompok dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kontribusi yang diberikan oleh pemerintah untuk program KB di Kecamatan Tugu ialah dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang ikut Vasektomi. Kontribusi yang berasal dari masyarakat dapat dilihat dari adanya saran yang disampaikan kepada PLKB, sumbangan dengan berswadaya mengadakan posyandu dan Paguyuban Priyo Utomo. Masyarakat dan aparat pemerintah setempat telah berkontribusi terhadap program KB di Kecamatan Tugu baik itu kontribusi yang bersifat materi, saran, waktu dan tenaga.

c. Tanggung jawab

Pihak PLKB bertanggung jawab mengantarkan akseptor ke tempat pelayanan (Rumah Sakit Panti Wiloso) sesuai dengan perjanjian mereka ketika masyarakat telah mendaftar ke PLKB untuk ikut program KB. Walaupun pelayanan MOP telah digratiskan dan PLKB siap mengantar warga ke tempat pelayanan, jumlah peserta KB pria di Kecamatan Tugu masih sangat rendah, salah satu alasannya yaitu karena rasa takut warga terhadap efek samping yang ditimbulkan setelah operasi dapat mengganggu pekerjaan mereka. Masyarakat di Kecamatan Tugu belum sepenuhnya mampu menerima resiko

yang diperoleh dalam program keluarga berencana.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang

a. Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang

1) Transmisi

Sosialisasi program KB yang secara khusus untuk KB pria belum diselenggarakan di Kecamatan Tugu, untuk pelaksanaan Paguyuban Priyo Utomo belum rutin dan merata di setiap kelurahan. PLKB Kecamatan Tugu memberikan KIE KB (Komunikasi, edukasi dan informasi KB) kepada masyarakat secara berkelompok maupun perorangan pada saat posyandu.

2) Kejelasan

PLKB dan kader memberikan informasi dengan jelas kepada masyarakat pada saat posyandu, isi komunikasi yang disampaikan yaitu mengenai jadwal kegiatan pelayanan KB gratis, dan penjelasan alat kontrasepsi KB. Sementara itu, untuk kegiatan di Paguyuban Priyo Utomo PLKB memberikan edukasi kepada masyarakat melalui koordinasi terlebih dahulu dengan warga yang menjadi panitia.

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui mengenai program KB dan alat kontrasepsinya, informasi mengenai program KB telah mudah didapatkan. Penggunaan berbagai macam media dalam sosialisasi KB juga telah dilakukan di Kecamatan Tugu.

3) Konsistensi

Penyampaian informasi program KB di Kecamatan Tugu dilaksanakan pada saat rapat koordinasi dari tingkat kecamatan

hingga kelurahan, informasi yang diperoleh pada saat Rakorcam disampaikan kepada kader-kader KB ketika menghadiri Rakolkel kemudian kader menyampaikan kepada masyarakat pada saat kegiatan posyandu, alur tersebut dapat memudahkan penyampaian informasi yang diperoleh dari Bapermasper Kota Semarang kepada masyarakat.

Terdapat konsistensi dan keseragaman dalam penyampaian informasi program KB di Kecamatan Tugu, informasi yang diterima oleh kader KB kelurahan yang satu dengan yang lainnya akan sama, karena mereka juga sama-sama mengikuti rakolkel yang dilaksanakan setiap bulannya, sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan informasi yang diperoleh masyarakat di Kecamatan Tugu.

b. Pendidikan Masyarakat di Kecamatan Tugu

1) Kognitif (*cognitive domain*)

Masyarakat Kecamatan Tugu pada umumnya telah mengetahui mengenai program KB, baik itu KB wanita dan KB pria, namun sebagian besar masyarakat hanya sekedar tahu saja, setelah menjadi peserta barulah mengetahui lebih lanjut mengenai MOP atau vasektomi.

2) Afektif

Secara umum masyarakat menanggapi program KB dengan baik, hanya masyarakat tertentu saja yang masih menolak untuk berpartisipasi dalam program KB. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan program KB di Kecamatan Tugu juga telah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh ulama dan masyarakat setempat.

Bagi masyarakat di Kecamatan Tugu yang telah menjadi peserta KB tidak menemukan pertentangan yang berasal dari keluarganya, dengan berbagai pertimbangan

keluarga memberikan dukungan terhadap keputusan mereka untuk menjadi peserta KB, selain itu dari dirinya sendiri secara mantap memutuskan untuk menjadi peserta KB. Tanggapan yang diberikan terhadap program KB pun juga positif, terutama ditujukan bagi mereka yang telah memiliki cukup anak, dan tentu saja karena program KB dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

3) Psikomotorik

Di dalam program KB masyarakat yang telah memiliki kemampuan psikomotorik yaitu mereka yang telah berpartisipasi sebagai peserta aktif KB. Jumlah partisipasi KB pria di Kecamatan Tugu masih rendah yaitu sekitar 3 % dari total jumlah PUS. Rendahnya partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu dikarenakan kurangnya kemauan masyarakat untuk menjadi peserta aktif KB pria, selain itu istri juga mempengaruhi keputusan suami untuk ikut program KB.

Beberapa warga yang menjadi peserta KB menerima ajakan dari temannya yang terlebih dahulu menjadi peserta, selain itu tentu saja PLKB dan kader juga memiliki peranan yang besar untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menjadi peserta KB. Beberapa peserta KB ada pula yang belum mengajak orang lain untuk berKB dikarenakan kesibukan pekerjaan dan kekhawatiran terhadap resiko yang didapat oleh orang yang diajak berKB.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Studi Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang, disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan kurangnya keterlibatan mental dan emosional masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan program keluarga berencana di Kecamatan Tugu, secara fisik masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi program keluarga berencana, namun tidak semua masyarakat yang hadir tersebut berkeinginan untuk menjadi peserta aktif KB.
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang meliputi:

- a. Komunikasi.

Komunikasi menjadi faktor yang menghambat partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu. Komunikasi yang terjadi di lapangan, dilihat dari pentransmisian informasi belum semua masyarakat memperoleh sosialisasi program keluarga berencana, sehingga informasi mengenai program KB pria tidak merata diterima oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Tugu. Selain itu, proses transmisi program KB pria terkendala oleh kurangnya PLKB, idealnya satu orang PLKB membawahi dua sampai tiga kelurahan, sementara untuk Kecamatan Tugu satu orang PLKB membawahi tiga hingga empat kelurahan.

- b. Pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor yang menghambat partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu. Terdapat pertentangan yang berasal dari lingkungan dan anggota keluarga masyarakat yang ada di Kecamatan Tugu, hal ini timbul karena adanya anggapan negatif terhadap program

keluarga berencana, sehingga masyarakat tersebut enggan untuk berpartisipasi menjadi peserta aktif KB.

REKOMENDASI

1. Untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu, maka keterlibatan mental dan emosional masyarakat perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memotivasi masyarakat untuk menjadi peserta aktif KB.
2. Terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu, penulis memberikan saran sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan faktor komunikasi, maka untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu, komunikasi program KB pria perlu ditingkatkan dengan pelaksanaan sosialisasi program KB pria secara rutin dan merata diadakan diseluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tugu. Selain itu, perlu untuk mengoptimalkan kemampuan PLKB di Kecamatan Tugu dengan memberikan pelatihan secara rutin.
 - b. Terkait dengan faktor pendidikan, untuk meningkatkan partisipasi pria dalam program keluarga berencana di Kecamatan Tugu, PLKB maupun kader tetap memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana, selain itu melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat agar bisa mendapatkan dukungan terhadap pelaksanaan program KB pria di Kecamatan Tugu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan masyarakat tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi, dan perencanaan*. Liberty : Yogyakarta
- Muhammad, Arni. 2007. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. PT Elex Komputindo: Jakarta
- Rohman, Ainur. 2009. *Politik, Partisipasi Dan Demokrasi Dalam Pembangunan*. Program Sekolah Demokrasi Averroes Community: Malang
- Siswoyo, Dwi. Dkk. 2008. *Ilmu pendidikan*. UNY Press: Yogyakarta

-----2006. *Reformasi Birokrasi Dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Averroes Press: Malang

Syam, M Noor. Dkk. 2003. *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*. Usaha Nasional : Surabaya.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2007. *Manajemen Publik*. PT. Grasindo: Jakarta

Non Buku:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga Berencana](http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Berencana)

<http://www.bps.go.id>

Sadiyah. 2012. *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang*. <http://eprints.undip.ac.id> (19 Juni 2013).